

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aminudin, *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, dalam Jurnal e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. Hal.89.
- Bappenas dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*, hlm.103.
- Desmon King and Gerry Stoker. (Eds.) *Rethinking Local Democracy*, (London: Macmillan Press Ltd, 2003), hlm. 5
- Irfan Fachruddin, “*pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*”, Bandung P.T. alumni Bnadung,2004, Hlm 88-94
- Irfan Fachruddin, “*pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*”, Bandung P.T. alumni Bandung,2004, Hlm 197
- Irfan Fachruddin, “*pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*”, Bandung P.T. alumni Bandung,2004, Hlm 251.
- Irfan Fachruddin, “*pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*”, Bandung P.T. alumni Bandung,2004, Hlm 252.
- Jimly Asshiddiqie, “*Kamus Hukum Tata Negara*”, Konstitusi Press, 2007.
- Kamus Melayu Jambi Dialek Jambi Seberang – Indonesia.
- Marzuki Lubis, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-Undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 12.
- Muh. Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. UII Press, Yogyakarta, 2006,hal, 90.
- M. Manullang,, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Medan, 1988, hal, 173.
- Muh. Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. UII Press, Yogyakarta, 2006,hal, 90.

Philipus M. Hadjon, “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, Gadjah Mada University Press, 2002.

Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta ,2011) hlm 125.

Sir William O, Hart – J.F. Garner, , *Introduction To The Law of The Local Government and Administration*, Butterworths, London, hlm, 297. Dikutip kembali oleh Bagir Manan, 1995, dalam, Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1973, hal, 181

Satjipto Rahardjo, “*Hukum dan Masyarakat*”, Genta Publishing, 2007.

Siagian, Sondang P., *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, 2005, hlm. 92.

Todaro & Smith dalam *Economic Development*, 12th Edition, Pearson, 2015.

B. Wawancara

Maria Magdalena Tampubolon, S.S. Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2024-2029 Fraksi P-DIP Daerah Pemilihan Alam Barajo

Pangeran HK Simanjuntak, S.E., M.Si. Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2024-2029 Fraksi NasDem Daerah Pemilihan Kotabaru

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

_____. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

_____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

_____. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

_____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

_____. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah

D. Jurnal/Internet/Website

Budiyono, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam
Rangka Mewujudkan Good Governance, Jurnal: Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum
Volume 7 No. 1 Januari-April 2013.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-pengawasan-oleh-dprd-kabupaten-kota->

[https://www.google.com/search?q=Pengertian+Fungsi+Pengawasan+pada+DPRD+Kota&
oeq= Pengertian+Fungsi+Pengawasan+pada+DPRD+Kota](https://www.google.com/search?q=Pengertian+Fungsi+Pengawasan+pada+DPRD+Kota&oeq=Pengertian+Fungsi+Pengawasan+pada+DPRD+Kota)

Damang, “*Pengertian Kewenangan*”, (Online), ([http://www.negarahukum.com/hukum/
pengertian-kewenangan.html](http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html)), diakses 2 mei 2023

Evi Fitriyani Aulia “*Kekuasaan dan Kewenangan*”, (Online), ([http://www.
kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan](http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan)),diakses 2 mei 2023

Nanda Pratama Sukoco, *Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur*, (Unair Surabaya: Jurnal Administrasi Publik Th. II Nomor 8, Juli- Desember 2013), hlm.92

Ilham, Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Propinsi Sulawesi Selatan, dalam Jurnal of Lex Generalis (JLS), Volume 2, Nomor 3, tahun 2021.

Syaiful Anam, dkk, *Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Publik*, dalam Jurnal Reformasi, Volume 10 Nomor 1 (2020).

Hariande L. Bintang dan Ahmad Jamaan, *Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda*, dalam *Jurnal: Demokrasi & Otonomi Daerah*, Volume 11, Nomor 1, Juni tahun 2013.

sim-dprd.jambikota.go.id. *Komisi III - Bidang Infrastruktur – DPRD Kota Jambi SIM-DPRD* (Sistem Informasi Manajemen DPRD Kota Jambi)

<https://jambisatu.id/berita/3767/proyek-jaling-pemkot-jambi-proyek-kota-jambi/komisi-iii-dprd-kota-jambi-minta>

https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/61_pengawasan-dprd-dalam-pemerintahan-daerah

sim-dprd.jambikota.go.id/profil

Sejarah Kota Jambi Diarsipkan 2022-09-01 di Wayback Machine. di jambikota.go.id

www.metrojambi.com/kolom/"Jambi Kota Seberang". *MetroJambi*. 28 Desember 2015.